

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan terdiri dari bermacam-macam wilayah, meliputi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Untuk mengelola inisiatif pembangunan secara efektif dan memenuhi kebutuhan warganya, pemerintah Indonesia membentuk kerangka otonomi daerah yang komprehensif. Kebijakan ini secara formal diberlakukan setelah Reformasi 1998, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diamandemen dan dikonsolidasikan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah diperkirakan akan membawa transformasi yang signifikan dalam pemerintahan daerah, terutama dalam interaksi pemerintahan, interaksi keuangan, dan dalam administrasi pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang unggul tentang keadaan yang ada di daerahnya masing-masing. Akibatnya, setiap daerah dianggap memiliki informasi yang baik tentang kebutuhan fiskal yang diperlukan untuk memfasilitasi operasi pemerintah dan mendorong pembangunan (Heryanti et al., 2019).

Lebih lanjut menurut (Heryanti et al., 2019) pengenalan otonomi daerah mensyaratkan pembentukan delegasi dan tanggung jawab, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya keuangan. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian integral dari kerangka desentralisasi fiskal. Pendelegasian kewenangan pendanaan kepada pemerintah daerah dengan cara mempertimbangkan potensi keuangan masing-masing daerah, serta menerapkan mekanisme penyaluran dana perimbangan keuangan pusat ke daerah.

Tanggung jawab penggunaan potensi keuangan daerah sendiri dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 Pasal 1, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Selain PAD, dana perimbangan ialah salah satu sumber pendanaan yang signifikan bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berikut ini data mengenai PAD dan dana perimbangan.

Tabel 1. 1**Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Presentase	Dana Perimbangan	Presentase
2019	Rp44.150.910.000.000	33,64%	Rp62.808.090.000.000	47,86%
2020	Rp39.915.360.000.000	32,11%	Rp60.300.730.000.000	48,51%
2021	Rp45.351.780.000.000	34,38%	Rp63.019.650.000.000	47,78%
2022	Rp54.866.430.000.000	40,60%	Rp60.713.580.000.000	44,92%
Rata-rata	Rp46.071.120.000.000	35,18%	Rp61.710.512.500.000	47,27%

Sumber: djpk.kemenkeu, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, angka pendapatan asli daerah masih belum optimal terhadap kontribusi pendapatan daerah. Kontribusi PAD pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 – 2022 rata-rata mencapai Rp46.071.120.000.000 atau 35,18% dari total rata-rata pendapatan daerah tahun 2019-2022, dan pajak daerah menjadi sumber pendapatan utama dalam kerangka pendapatan asli daerah. Dari struktur data APBD diketahui bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih relatif tinggi, hal ini dibuktikan dengan data pada tabel 1.1 di atas yang menunjukkan bahwa rata-rata dana perimbangan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2022 diperoleh sebesar Rp61.710.512.500.000 atau 47,27% dari total rata-rata pendapatan daerah tahun 2019-2022.

Tabel 1. 2

Tahun	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
2019	Rp19.634.120.000.000	5,02%
2020	Rp14.070.130.000.000	-2,52%
2021	Rp15.530.130.000.000	3,74%
2022	Rp14.843.220.000.000	5,45%
Rata-rata	Rp16.019.400.000.000	2,92%

Sumber: djpk.kemenkeu & bps, data diolah (2023)

Rendahnya persentase penggunaan dana Belanja Modal, merupakan masalah lain yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah. Belanja Modal yang secara teori akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi hanya memperoleh persentase yang rendah. Berdasarkan tabel 1.2 di atas, rata-rata penggunaan dana belanja modal sebesar Rp16.019.400.000.000 atau hanya mengambil porsi 12,44% dari total rata-rata realisasi belanja daerah tahun 2019-2022. Hal ini terjadi karena masih tingginya proporsi anggaran dalam belanja operasi, khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Pengukuran kemajuan ekonomi secara agregat tetap bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Kenaikan produksi barang dan jasa dalam perekonomian merupakan salah satu tanda adanya pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan alat yang penting untuk menganalisa pembangunan ekonomi (Heryanti et al., 2019).

Berdasarkan tabel 1.2 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,92%. Pada tahun 2020 ekonomi di Jawa Barat mengalami minus sebesar 2,52%, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi pada tahun 2021 perekonomian mulai meningkat menjadi 3,74%, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini merupakan dampak dari kebijakan pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19 yang cukup baik di Jawa Barat yang dibuktikan dengan kasus COVID-19 yang semakin menurun, penurunan penyebaran COVID-19 ini dikarenakan proses vaksinasi yang berhasil disertai dengan kebijakan pemda yang bertindak cepat (Djpb.kemenkeu.go.id).

Pemeriksaan kinerja keuangan pada pemerintah daerah ialah salah satu metrik yang dipakai dalam melakukan pengukuran kepatuhan terhadap peraturan dalam melaksanakan keuangan yang efektif di daerah tertentu. Peringkat yang menguntungkan merupakan prasyarat bagi entitas eksternal untuk mempertimbangkan berinvestasi di area tersebut. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah ialah strategi dalam menumbuhkan tingkat kemandirian dalam pemerintah daerah.

Penerimaan daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia serta belanja daerah merupakan faktor yang memberi pengaruh kinerja keuangan di dalam pemerintah daerah. Menurut (Maulina et al., 2021) alat ukur atau rasio untuk menentukan kinerja keuangan di dalam pemerintah daerah yakni, rasio efektivitas, lalu rasio efisiensi, rasio kemandirian, selanjutnya rasio pertumbuhan pendapatan serta rasio keserasian modal. Pada penelitian ini yang akan digunakan sebagai pengukur rasio kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah. Tujuan dari penggunaan rasio kemandirian daerah yaitu, untuk mendeskripsikan ketergantungan yang ada di daerah terkait penggunaan sumber dana secara eksternal serta mendeskripsikan tingkat partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan yang ada di daerah.

Berikut inilah tabel kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Barat tahun 2019-2022 yang di ukur menggunakan rasio kemandirian.

Tabel 1. 3
Kinerja Keuangan

Tahun	PAD	Transfer & Penerimaan Pinjaman	Rasio Kemandirian
2019	Rp44.150.910.000.000	Rp83.730.620.000.000	52,73%
2020	Rp39.915.360.000.000	Rp70.872.740.000.000	56,32%
2021	Rp45.351.780.000.000	Rp83.630.560.000.000	54,23%
2022	Rp54.866.430.000.000	Rp79.893.700.000.000	68,67%
Rata-Rata			57,99%

Sumber: djpk.kemenkeu, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas diketahui Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pada periode anggaran 2019-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2022 rata-rata Rasio Kemandirian pemerintah daerah Jawa Barat berada di angka 57,99%, nilai tersebut tergolong sedang dan pola hubungan yang terjadi adalah partisipatif yang berarti pemerintah daerah Jawa Barat belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Beberapa penelitian mengenai pendapatan asli daerah telah dilakukan, misalnya penelitian (Wahyudin & Hastuti, 2020) mengatakan bahwasannya pendapat asli yang ada di daerah mempunyai pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan di dalam pemerintahan daerah, selanjutnya (Apridiyanti, 2019) menyatakan bahwasannya pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan di dalam pemerintah daerah. Akan tetapi penelitian tersebut bertentangan pada penelitian yang dilaksanakan (Putri & Darmayanti, 2019) dengan mengatakan bahwasannya pendapatan asli daerah berpengaruh secara negatif serta signifikan terkait kinerja keuangan di dalam pemerintah daerah dan penelitian (Niswani et al., 2022) mengatakan bahwasannya pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh (Maulina et al., 2021) serta (N. Sari et al., 2020) mengenai dana perimbangan, menyatakan bahwasannya dengan parsial pada dana perimbangan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja

keuangan pemerintahan daerah. Hasil penelitian (Rahma Putri & Amanah, 2020) serta (Ardelia et al., 2022) menyebutkan bahwasannya dana perimbangan mempunyai pengaruh secara negatif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Kemudian hasil dari penelitiannya bertentangan dengan penelitian dari (Nauw, 2021) yang menyebutkan bahwasannya dana perimbangan tidaklah mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan di pemerintahan daerah.

Penelitian mengenai belanja modal yang dilaksanakan (Digdowiseiso et al., 2022) serta (Lathifa, 2019) menyebutkan bahwasannya terdapat pengaruh secara positif serta signifikan dari belanja modal terhadap kinerja keuangan di pemerintahan daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Nadia Febrianty & Gerry Hamdani Putra, 2023) serta (Antari & Sedana, 2018) menyebutkan bahwasannya belanja modal mempunyai pengaruh secara negatif serta signifikan terhadap kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah. Akan tetapi penelitian yang dilaksanakan (Prastiwi & Aji, 2020) menyatakan bahwasannya belanja modal mempunyai pengaruh tidaklah signifikan terkait dengan kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan yang ada di daerah daerah, selanjutnya penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2020) menyebutkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh secara positif serta signifikan terkait Kinerja Keuangan yang ada di pemerintahan daerah. Akan tetapi penelitian dari (Heryanti et al., 2019) menyebutkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh tidaklah signifikan terkait kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah serta penelitian yang dilaksanakan (Setiani, 2022) menyebutkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi tidaklah mempunyai pengaruh secara signifikan terkait kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah.

Teori keagenan digunakan sebagai grand teori dalam penelitian ini. Menurut Jansen dalam (Aulia & Rahmawaty, 2020) teori keagenan merupakan teori yang membahas tentang suatu perjanjian antara 2 (dua) belah pihak, yaitu agen (pemerintah) serta prinsipal (masyarakat atau publik). Dalam teori agensi, prinsipal akan memberikan otoritas serta keyakinan kepada agen di dalam pengambilan keputusan atau ketetapan dengan mengatasnamakan sebuah prinsipal.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada penelitian ini akan berusaha mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu salah satunya penelitian dari (Ardelia et al., 2022). Selain itu, peneliti akan menambah kebaruan pada variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian kepada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan pengaruh terkait kinerja keuangan pemerintah Daerah.

Menurut penjelasan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Rata-rata pendapatan asli daerah tahun 2019-2022 hanya mengambil porsi 31,43% dari total pendapatan daerah dan pajak daerah masih menjadi sumber utama dari pendapatan asli daerah. Nilai tersebut dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.
2. Kurang dalam melakukan pengelolaan dan pemungutan potensi pendapatan asli daerah. Kurangnya pengelolaan ini dapat berdampak terhadap rendahnya pendapatan asli daerah dan dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.
3. Tingkat ketergantungan yang ditunjukkan dengan persentase dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, hal tersebut akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.
4. Belanja modal yang seharusnya akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, hanya mengambil porsi 12,45% dari realisasi belanja. Angka tersebut disebabkan pemerintah daerah Jawa Barat kurang produktif dalam melakukan pembangunan daerahnya.

5. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19. Penurunan ekonomi tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Barat berdasarkan rasio kemandirian rata-rata berada di angka 61,17%, nilai tersebut tergolong sedang yang berarti pemerintah daerah Jawa Barat belum sepenuhnya mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

1.3 Batasan Masalah

Tujuan menetapkan batasan masalah adalah untuk memastikan bahwa fokus penelitian tetap berada dalam pokok permasalahan yang ditentukan. Pada penelitian yang dilaksanakan ini, batasan masalahnya nantinya melakukan pembahasan terkait dengan pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022?

5. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menguji dan melakukan analisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022.
2. Untuk mengetahui, menguji dan melakukan analisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022.
3. Untuk mengetahui, menguji dan melakukan analisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022.
4. Untuk mengetahui, menguji dan melakukan analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022.
5. Untuk mengetahui, menguji dan melakukan analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan teoritisnya, dalam penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menyumbangkan perspektif, pemahaman, dan sumber yang berharga untuk mengevaluasi kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan ini berupaya agar memberi informasi terkait pengaruh pendapatan

asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan harapan bisa menambahkan pengetahuan serta pemahaman tentang pendapat asli daerah, belanja modal, dana perimbangan serta pertumbuhan ekonomi pemerintahan daerah. Selain itu, peneliti diharapkan dapat memahami faktor yang memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah dalam tahun ke tahun.

2. Bagi Instansi

Dengan harapan hasil dari penelitian ini bisa menjadi *feedback* bagi peningkatan kinerja keuangan daerah, dan bisa memberi manfaat agar menjadi bahan pertimbangan serta masukan untuk pemerintahan daerah terkait.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan menjadi referensi atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi serta kinerja keuangan yang ada di pemerintahan daerah.